

SKRIPSI

**FENOMENA GOLONGAN PUTIH DI KOTA MAKASSAR PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2013**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Oleh :

MUHAMMAD RABBANI

E 111 09 259

**JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

FENOMENA GOLONGAN PUTIH DI KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2013

Nama : Muhammad Rabbani

Nomor Pokok : E 111 09 259

Jurusan : Politik Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi ini dibuat Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar, 27 Desember 2013

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Saad , MA

NIP. 19550128 198502 1 001

Ariana Yunus ,S.IP.,M.Si

NIP. 19710705 199803 2 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik – Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Ketua Program Studi
Ilmu Politik

Dr. H. A. Gau Kadir, MA

NIP. 19501017 198003 1 002

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

NIP. 19730813 199803 2 001

HALAMAN PENERIMAAN

FENOMENA GOLONGAN PUTIH DI KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2013

Nama : Muhammad Rabbani

Nomor Pokok : E 111 09 259

Jurusan : Politik Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, 27 Desember 2013

Panitia Ujian Sarjana

Ketua : Dr. Muhammad Saad MA (.....)

Sekretaris: A. Naharuddin, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Drs. H. A. Yakub, M.Si (.....)

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si (.....)

Dr. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum (.....)

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum warhamatullahi Wabarakatuh

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. dalam pelaksanaan pemilu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada saat pemilihan khususnya masyarakat di Kota Makassar . Dengan melihat keadaan ini, maka penelitian ini ingin mencoba meneliti faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi munculnya Golput di kota Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi Selatan 2013 yang baru-baru ini diadakan, untuk itu penelitian ini berjudul “ **Fenomena golongan putih di kota Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013** ”.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud baktiku kepada kedua orang tua penulis yang terkasih. **Ayahanda Drs.H.Junaid Shahib , M.Ag dan Ibunda Hj.Hamna Katu** terima kasih atas segala kasih sayang, kepercayaan, suport, nasehat yang senantiasa Ayahanda dan Ibunda berikan kepada penulis. Beliau tak henti memanjatkan do'a kepada Allah untuk menjaga penulis di tempat rantauan menuntut ilmu, memberi materi yang kalian usahakan dan berikan untuk kecukupan penulis. Semoga Allah memberi kesempatan kepada penulis untuk berbakti kepada ayah

dan ibu di dunia dan akhirat. Untuk kakakku (Suciati ,Dahlan,Ummi Syaikhah)dan adik-adikku (Badar ,Azizah Faizah),Jazakillah atas do'a dan dukungan yang tiada henti kalian berikan "I Love Us"

Skripsi ini tidak akan dapat penulis rampungkan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Sadar akan hal ini maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Saad, MA selaku Pembimbing I, terimakasih atas waktu, tenaga, dan arahan yang telah diberikan selama ini.
2. Ibu Ariana Yunus ,S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II , terimakasih atas waktu , tenaga dan arahan yang telah diberikan selama ini.
3. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UNHAS, terima kasih atas waktu, tenaga dan arahan yang telah diberikan selama ini
4. Bapak Prof.Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Wakil Dekan I
5. Seluruh dosen penguji ujian sarjana , Pak Drs. H. A. Yakub, M.Si , Pak Ali Armunanto, S.IP, M.Si ,ibu Sakinah Nadir ,S.IP., M.Si, Dr.Muhammad Nasir Badu dan bapak A.Naharuddin,S.IP.,M.Si yang telah banyak membagi ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada penulis

6. Seluruh dosen di lingkungan FISIP dan lingkungan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu .
7. Staf pegawai di Jurusan Politik pemerintahan (Kak Irma, Bu hasna, Bu Nanna, Kak Ija)
8. Seluruh Civitas Akademik se Universitas Hasanuddin mulai jajaran tertinggi Rektor Unhas sampai yang terendah terima kasih atas segala peran kalian dalam perjalanan studiku di kampus tercinta ini.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Fisip Unhas (**HIMAPOL FISIP UNHAS**), dari angkatan 2003 sampai 2013. Dan senior-senior yang sudah tak kudapatkan sejak diriku menginjakkan kaki di tanah hitam putih Himapol
10. Teman-teman Sospol angkatan 2009, terutama saudara-saudariku "**INTERAKSI 09**". Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama.
11. Keluarga besar KKN Gelombang Khusus 83 Tahun 2013 Kec. Bangkala Kel. Benteng.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para informan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian, Drs. Arifin, Ust. Nasrullah, SP, Ummul Khair, S.pd., M.pd., Safaruddin, Yuni Wahyuni, S.kg, Ny Sakking dan semua informan yang tidak sempat penulis tuliskan namanya.

Terima atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh teman-temanku di rumah, ada Wahid yang sudah duluan sarjana, ada risman jaya, yang sibuk urusan magangnya diluar negri, ada enal, dirga, ramank, yusran yang sering menemani penulis karaokean di saat stres masalah skripsi dan terakhir ada Ira Sulastri, Amd. Keb yang sedang jauh disana menuntut ilmu, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat kepada penulis, thanks, semuanya. ^__^

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/Ibu/Saudara (i). Semoga segala yang telah dilakukan bernilai ibadah di sisinya. Amin

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 11 Desember 2013

Muhammad Rabbani

ABSTRAKSI

Muhammad Rabbani, Nim E11109259, dengan judul “Fenomena Golongan Putih di Kota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013” di bawah bimbingan Dr.Muhammad Saad ,MA sebagai pembimbing I, dan Ariana Yunus ,S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan menganalisis **Fenomena golongan putih di kota Makassar pada Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi selatan 2013** . Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dalam pelaksanaan pemilu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) pada saat pemilihan khususnya masyarakat di Kota Makassar. Dengan melihat keadaan ini, maka penelitian ini ingin mencoba meneliti bagaimana keberadaan golput yang ada di kota Makassar serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi munculnya Golput di Kota makassar dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi selatan 2013.

Teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan tersebut adalah Teori Perilaku Pemilih, Faktor Yang Mempengaruhi tidak Memilih (Golput) , dan Konsep Golongan Putih. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan Informan masyarakat di Kecamatan Tamalanrea.

Faktor latarbelakang social ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan dan keadaan ekonomi sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat di Kecamatan Tamalanrea dalam hal tidak ikut memilih (golput) pada saat pemilihan. Faktor psikologis dan pilihan rasional juga turut mempengaruhi mereka untuk tidak ikut serta dalam pemilihan. Dalam hal ini masyarakat masih kurang percaya terhadap calon kepala daerah atau wakil calon kepala daerah, karena masyarakat menganggap janji-janji pada saat kampanye tidak terealisasi apabila kekuasaan sudah dimiliki mereka dan kebijakan yang diberikan jauh dari kata memuaskan. Hali inilah yang membuat masyarakat tidak ikut memilih (golput) pada saat pemilihan berlangsung.

DAFTAR ISI

Lembar Judul

Lembar Pengesahan

Lembar Penerimaan

Kata Pengantar..... i

Abstraksi..... v

Daftar Isi..... vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah..... 7

1.3 Tujuan Penelitian..... 8

1.4 Manfaat Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Golongan Putih (Golput).....10

2.2 Teori Perilaku Pemilih (Voter Behavior) 19

2.3 Faktor yang mempengaruhi tidak memilih (Golput) 26

2.4 Kerangka Pemikiran..... 35

2.5 Skema Pemikiran..... 36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Dan Dasar Penelitian..... 37

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian..... 38

3.3 Pemilihan informan dan Unit Analisis..... 39

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Keadaan Geografis.....	42
4.2 Keadaan Demografi.....	46
4.3 Fasilitas Kecamatan	51
4.4 Organisasi – organisasi Kecamatan	54
4.5 Struktur Pemerintahan Kecamatan	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Gambaran keberadaan golput di kota Makassar.....	58
5.2 Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat menjadi Golput	66
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	81
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres ataupun pemilu kepala daerah (pilkada) selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih atau golput. Entah kenapa golongan yang satu ini selalu menjadi sosok yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Disebut mengkhawatirkan karena golongan ini dinilai sosok yang tidak mendukung pesta demokrasi yang sudah ada sejak dulu di negeri ini, dan jumlahnya cukup banyak bahkan menyamai dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi dalam suatu pemilu atau pilkada.

Angka golongan putih (golput) atau *voter's turn out* (VTO) apalagi jika melebihi dari jumlah suara pemenang, maka tentunya akan sulit untuk mengatakan bahwa kemenangan calon / kandidat adalah sudah merepresentatifkan kemauan sebagian besar masyarakat, lebih jauh lagi efek turunannya adalah sukar untuk membangun logika tentang dukungan maksimal dari masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang.

Data yang telah dihimpun dari KPU kota Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi Selatan. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Makassar¹ adalah sebesar 1.046.731 orang dan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 625.847 orang

¹<http://makassar.tribunnews.com/2013/01/29/413.006> - warga - makassar – golput – saat – pilgub - sulsel diakses pada 13 Mei 2013).

berarti ada sebanyak 420.884 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya hal ini juga berarti tingkat partisipasi pemilih Kota Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi Selatan 2013 hanya 60,21%. Sementara data pada pemilihan kepala daerah provinsi Sulawesi selatan 2007 kemarin menunjukkan dari jumlah DPT yang sebesar 927.533 Daftar Pemilih Tetap (DPT)², maka yang menggunakan hak pilihnya sebesar 503.067 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 424.466 orang atau sebesar 45,76%.

Penjelasan di atas terlihat bahwa angka golput di Kota Makassar berada pada kisaran 40%, hal ini cukup tinggi karena selisih perolehan suara antara kandidat yang memperoleh suara terbanyak (29,84%) terhadap kandidat yang memperoleh suara paling sedikit (2,77%) hanya terpaut 27,07%.

Apabila sebagian besar golput yang berjumlah 40,21% memberikan suaranya kepada kandidat yang perolehan suaranya paling sedikit, maka jalan ceritanya akan menjadi lain. Besarnya angka golput inilah dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti.

Angka golput yang tinggi berarti sulit mendapat dukungan dari masyarakat secara maksimal bagi pemerintah, lebih jauh lagi dapat mengarah kepada hilangnya legitimasi kepemimpinan. Kondisi seperti ini

² <http://rakyatsulsel.com/jelang-pencoblosan-waspada-ajakan-golput.html> (diakses pada 13 Mei 2013).

sangat tidak kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah maupun kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut memilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi selatan 2013 di kota Makassar antara lain sebagai berikut.

Pertama, faktor social ekonomi dengan melihat dari tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang dominan masih rendah. Seperti di kecamatan tamalanrea yang merupakan daerah dengan tingkat golput tertinggi di kota Makassar , dimana wilayah ini banyak ditemukan pemilih dengan tingkat perekonomian serta pendidikan yang rendah. *Kedua*, faktor psikologis yaitu kedekatan yang kurang dirasakan masyarakat terhadap kandidat pilkada dikarenakan bentuk sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh kelapisan bawah dan cenderung hanya berfokus pada wilayah sentral kota Makassar.

Ketiga , faktor rasional yaitu dimana masyarakat tidak ikut memilih karena mereka mementingkan urusan pekerjaan mereka dari pada datang ke tempat pemilihan untuk memilih, mereka tidak percaya lagi dengan calon atau kandidat. Kemudian gambaran umum keberadaan golput di kota Makassar dapat dibedakan menjadi dua kategori golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya , yang pertama yaitu kategori masyarakat golput pragmatis , karena mereka apatis akan system pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi

yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemilu, Sedangkan ke dua yaitu sebagian masyarakat golput politis, masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos

Besaran angka golongan putih (golput) apalagi jika melebihi dari jumlah suara pemenang, maka tentunya akan sulit untuk mengatakan bahwa kemenangan calon / kandidat adalah sudah merepresentatifkan kemauan sebagian besar masyarakat, lebih jauh lagi efek turunannya adalah sukar untuk membangun logika tentang dukungan maksimal dari masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang. Banyak pandangan tentang pilihan golput tersebut dan semakin banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau disebut kelompok golput.

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilu.³ Sehingga, keputusan untuk tidak memilih ini juga merupakan suatu pilihan yang memungkinkan untuk diambil. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari berbagai macam karakteristik perilaku politik masyarakat yang diuraikan antara lain menyumbang dan

³ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grramedia, Jakarta, 1999, hal. 145.

memberikan dana bagi organisasi, mendirikan organisasi, menjadi anggota organisasi, mengemukakan pendapat, memberikan suara dan bersikap apolitis.

Beberapa hal penting tentang kenapa harus menggunakan hak pilihnya dengan baik. Pertama, pilihan untuk tidak memilih (golput) merupakan bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja dan APB daerah (untuk pilkada). Kedua, golput juga akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput. Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Dalam pemilihan secara langsung seperti saat ini, maka calon yang terpilih akan merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Justru hal ini menjadi bumerang bagi golput.

Paradigma pilkada langsung yang menempatkan rakyat sebagai “raja” dalam prosesnya telah menghadirkan analisis yang menarik tentang prospek demokratisasi di tingkat lokal. Di satu sisi diharapkan aspek-aspek positif muncul, seperti partisipasi masyarakat, kebebasan memilih, akuntabilitas pemerintahan, dan lain-lain. Namun di sisi lain ada aspek negatif yang sangat sulit dihindarkan seperti permainan politik uang, konflik dan kekerasan politik, peran elit yang terlalu dominan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Dalam hal ini, kembali rakyat menjadi titik sentral, di samping aturan dan elit lokal yang bermain. Ada

kekhawatiran bahwa hanya demi kepentingan politik suatu kelompok untuk menguasai posisi-posisi kepala daerah, rakyat yang seharusnya berdaulat untuk memilih kepala daerahnya lalu menjadi korban demokrasi. Selain tidak menghargai suara rakyat, hal itu juga mengancam keselamatan masyarakat dari kampanye politik hitam. Akhirnya bukannya partisipasi politik, namun mobilisasi politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat golongan putih terbagi atas dua bagian, yaitu masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan.

Dalam hal ini penulis akan meneliti masyarakat golongan putih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat tersebut sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada. Mana penjelasan yang lebih cocok untuk fenomena ini, hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk fenomena golput sehingga dapat mengetahui apa yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor apa sajakah yang menimbulkan perilaku ini yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian ini menitikberatkan pada kecamatan tamalanrea kota Makassar sebagai lokasi dan sampel penelitian karena kecamatan ini merupakan satu dari empatbelas kecamatan di kota Makassar yang

memiliki tingkat golput tertinggi pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi selatan 2013 berlangsung .

Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi Selatan secara langsung diadakan pada 22 Januari 2013 baru-baru ini berlangsung di kecamatan tamalanrea kota Makassar yang merupakan salah satu kota di Sulawesi selatan dan sekaligus ibukota provinsi.dalam hasil pemilihan ternyata masih didapati jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sekitar 50,18% dari total DPT 86.892 orang. Padahal jumlah suara yang tidak memilih cukup besar dan sangat berpengaruh pada hasil Pilkada tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“FENOMENA GOLONGAN PUTIH DI KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya demokrasi rakyat bebas menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin seperti apa dan mau hidup seperti apa.

Dari pernyataan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran keberadaan golongan putih yang ada di kota Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sul-Sel 2013 ?

- 2 Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sul-Sel 2013 di kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

Mengetahui dan menganalisis keberadaan golongan putih serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dan menjadi penyebab pemilih untuk menjadi golput di kota Makassar pada Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sul-Sel 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat akademis

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai Fenomena golongan putih yang terjadi di kota Makassar pada Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sul-Sel 2013 yang baru-baru ini dilaksanakan.

2. Manfaat praktis

- a) Sebagai masukan bagi pemerintah kota Makassar dalam hal ini KPU kota Makassar secara khusus dan pemerintah Sulawesi Selatan secara umum (KPU Provinsi) untuk mengantisipasi golput atau dapat menekan angka golput itu sendiri.
- b) Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Setiap penelitian memerlukan penjelasan titik tolak ataupun landasan pemikirannya dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang menggambarkan sudut mana masalah penelitian yang akan disorot ⁴

Kerangka teori merupakan landasan untuk melakukan penelitian dan teori dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan proposisi menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan ⁵

2.1 Konsep Golongan Putih (Golput)

Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan yang

⁴ Hadawi nawawi, *metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995 hal.40

⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendy, *metode penelitian sosial survei*, Jakarta: Rajawali pers, 1999, hal.112

merupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil . Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk tidak mengunjungi masing-masing tempat pemilihan umum (TPS). Mereka menamakan dirinya Golongan Putih atau Golput.⁶

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak.⁷

Bukan hanya memproklamasikan diri sebagai kelompok putih yang tidak memilih, mereka bahkan mengajukan tanda gambar segilima hitam dengan dasar putih. Namun pemilu 1971 menurut versi pemerintahan, diikuti oleh 95 persen pemilih. Satu hal yang mencuat dari kemunculan fenomena golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip demokrasi atau penentangan langsung terhadap eksistensi rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Menjelang Pemilu 1992, golput marak lagi sehingga bayangan kekuatannya diidentikkan sebagai partai keempat, di samping PPP, Golkar dan PDI. Namun jumlah pemilih pada Pemilu 1992, kembali menurut versi pemerintah, di atas 90 persen, persisnya 91 persen.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama , 2008 ,hal. 479

⁷ Fadillah Putra, *Partai politik dan kebijakan publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal. 104

Sepekan menjelang Pemilu 29 Mei 1997, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, selaku pribadi, mengumumkan untuk tidak menggunakan hak politiknya untuk memilih. Pernyataannya ini lalu dianggap sebagai kampanye terselubung kepada massa pendukungnya untuk memboikot pemilu, meski hal itu dibantah Megawati. Meski ada aksi PDI Perjuangan itu, jumlah pemilih pada Pemilu 1997 dilaporkan mencapai 90,58 persen.⁸

Angka 90 persen itu memang diakui merupakan angka semu. Karena pemilu-pemilu zaman Soeharto-disebut banyak pihak-identik dengan kecurangan demi untuk memenangkan Golkar. Angka adalah bagian dari rekayasa yang sangat menentukan.

Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara

⁸ <http://www.kompas.com>

kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu.⁹

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilahan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.

Dalam buku *political explore*¹⁰, *Indra J. Piliang* menyatakan bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 3 bagian yaitu: *Pertama*, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-*state*, ketika *state* dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk

⁹ <http://www.kompas.com>

¹⁰ Efriza, *Political explore*, Bandung : Alfabeta, 2012 hal. 545

UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.

Kedua, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.

Ketiga, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka. .

Menurut Mufti Mubarak,"bagi masyarakat,sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat,golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah"¹¹

¹¹ *Ibid hal 541*

Eep Saefulloh Fatah ¹² juga telah merangkum sebab-sebab orang untuk golput, diantaranya adalah:

1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu.
2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.

Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok golput.¹³ *Pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.

Kedua, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena

¹² *Ibid*, hal 546

¹³ Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 22

alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Dalam buku *Political Explore*¹⁴ beberapa ilmuan mendefinisikan golput, yang pertama yaitu menurut Irwan H, Dulay dia mengatakan golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilihan legislative, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa . Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada even pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan . Menurut B.M Wibowo, golput ialah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta pemilu . Selanjutnya, ia juga berpendapat , golput adalah sebutan bagi orang atau kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya . Menurut Susan Weich, ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih . Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu

¹⁴ Efriza , *Political explore, bandung : Alfabeta , 2012 hal 534*

ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya . Disamping itu ,ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. kalau seseorang merasa lebih beruntung secara financial dengan tidak hadir dalam pemilu , tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan . Menurut Muhammad asfar, dia mengatakan batasan perilaku nonvoting tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada disuatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau di tengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih , dalam konteks semacam ini, nonvoting adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari H Pemilu karena faktor tidak adanya motivasi .

Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-voter. Terminologi ini menunjukan besaran angka yang dihasilkan dari event pemilu diluar voter turn out. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2007) mengkategorikan Non-Voter tersebut menjadi tiga kategori yakni ; (a) Registered Not Voted ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) Citizen not Registered ; yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) Non Citizen ; mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.

2.1.1 Konsep Fenomena

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, fenomena diartikan sebagai rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia : 1997)

Fenomena dari bahasa Yunani; phainomenon, "apa yang terlihat", dalam bahasa Indonesia bisa berarti:

1. gejala, misalkan gejala alam
2. hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra
3. hal-hal mistik atau klenik
4. fakta, kenyataan, kejadian

Fenomena juga diartikan sebagai berikut :

- a. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam) atau gejala. Contoh : Gerhana adalah salah satu -- ilmu pengetahuan;
- b. Fenomena diartikan sebagai fakta dan kenyataan.

Contoh : Peristiwa itu merupakan -- sejarah yg tidak dapat diabaikan¹⁵

Kata Fenomena juga diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yg berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal atau perkara¹⁶

¹⁵ <http://www.kamusbesar.com/10894/fenomena> diakses pada tanggal 11 November 2013 pukul 22:00

¹⁶ <http://www.artikata.com/arti-333239-kasus.html> diakses pada tanggal 11 November 2013 pukul 22:15

Jadi berdasarkan penjelasan diatas,Fenomena dalam ruang lingkup social adalah rangkaian peristiwa,fakta maupun kenyataan yang sedang terjadi di masyarakat yang dapat diamati ataupun diteliti melalui pendekatan-pendekatan tertentu dalam hal ini fenomena golput yang sedang hangat-hangatnya terjadi di masyarakat kota Makassar.

2.2 Teori Perilaku Pemilih (Voter Behavior)

Secara teoritis Pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengetahui mengapa orang tidak memilih adalah melalui pendekatan teori-teori perilaku pemilih (voter behavior). Penjelasan ini memusatkan perhatian pada individu. Besar kecilnya partisipasi pemilih (voting turnout) dilacak pada sebab-sebab dari individu pemilih.¹⁷ Secara umum analisa-analisa mengenai “voting behaviour” atau perilaku pemilih didasarkan pada tiga pendekatan atau model yaitu:

a) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis untuk menerangkan perilaku pemilih,secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis,dikembangkan oleh ilmuan politik dari Universitas

¹⁷ Skripsi ,Rimbun P sirait , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Tidak Memilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Secara Langsung Tahun 2008 Di Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun ,Universitas Sumatera Utara , 2008

Columbia, yang di prakarsai oleh sosiolog Paul F. Lazarsfeld dan rekannya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Pendekatan sosiologis sering disebut Mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*) merupakan pendekatan yang menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.¹⁸

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika Serikat dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang mempunyai latar belakang pendidikan Eropa. Karena itu, Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denger, ketika menggunakan pendekatan ini menjelaskan perilaku memilih masyarakat Inggris, menyebut model ini sebagai social determinism approach.

b) Pendekatan Psikologis

Berbeda dengan pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, yang sering disebut dengan Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) lebih menekankan pada

¹⁸ Muhammad Asfar, Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Pemilih, Jurnal Ilmu Politik Edisi No. 16, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 52

pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Pendekatan psikologi ini mengembangkan konsep psikologi, khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku seseorang.

Konsep sikap merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku pemilih karena Menurut Greenstein ada 3 fungsi sikap yakni ; **pertama**, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. **Kedua**, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh atau kelompok yang dikaguminya. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan (defense mechanism).

Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Kedekatan inilah yang menentukan seseorang ikut memilih atau tidak. Makin dekat seseorang dengan partai atau

kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.¹⁹

c) Pendekatan Rasional

Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar science. Dikatakan bahwa manusia politik (Homo Politikucus) sudah menuju ke arah manusia ekonomi karena melihat adanya kaitan erat antara faktor politik dan faktor ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan public. Mereka percaya bahwa kita dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan-kepentingan dari actor yang bersangkutan (involved).²⁰

Pendekatan ini muncul untuk menjelaskan tentang pergeseran perilaku pemilih dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dengan status social yang sama, yang tidak bisa di jelaskan oleh dua pendekatan diatas.

Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai actor terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk yang rasional ia selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri . Ia melakukan hal itu dalm

¹⁹ *Ibid*, hal .52

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama ,2008,hal. 92

situasi terbatasnya sumber daya ,²¹ dan karena ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia harus memilih antara beberapa alternative dan menentukan alternative mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal untuk dirinya.

Dua pendekatan diatas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variable yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang.

Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi

²¹ James S. Coleman, "Rational Choice Theory," dalam F. Borgotta, ed., *Encyclopedia of Sociology*, Vol III (New York: Macmillian Publishing Company , 1992) hlm.1621

pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih²².

Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain²³. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya.

Terhadap pendekatan teori rasional ini, menurut Olson (1971) dan Downs (1957), “ tidak adanya kemauan mayoritas orang berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Pertanyaan yang akan diajukan individu yang rasional ketika mempertimbangkan apakah berpartisipasi adalah : ‘ apa yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini , dan apa yang

²² *Ibid*, hal.53

²³ *Ibid*, hal.54

tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya ?' dalam suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan , jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.” Ini adalah scenario “free rider” (pengguna layanan public yang tidak mau memenuhi kewajibannya) ketika non partisipasi merupakan opsi yang paling rasional. Hal ini menjadikan Olson sampai pada kesimpulan bahwa ‘Individu’ yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum atau kelompok .²⁴

Pendekatan ini biasa disebut juga dengan pendekatan Rasional Choice ,pendekatan ini dipelopori oleh Anthony Downs (1957) yang melihat orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya dipengaruhi oleh dua hal,yakni orientasi isu dan kandidat (figur) . Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang harus dan sebaiknya dilakukan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat . sedangkan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di sinilah pemilih menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional.²⁵

Menurut Lawrence atau Downs ataupun Roth,berdasarkan pendekatan ini,manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan tersebut

²⁴ Efriza , *Political explore, bandung : Alfabeta , 2012 hal 514*

²⁵ *Ibid hal.515*

individu akan memilih pilihan yang memberikan keuntungan paling besar terhadap dirinya. Berhubungan dengan pemilu,pendekatan ini ,pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiap-tiap parpol yang ada , tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada,lalu dilihat untung atau ruginya bagi individu.²⁶

Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih,yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan : apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari partai yang berkuasa kelak dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,bangsa dan Negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan partai.²⁷

2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Memilih (Golput)

Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput / nonvoting pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan perilaku pemilih diatas. Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelley (1975),Burnham (1987),Powell (1986) dan Downs (1957),Moon

²⁶ *Ibid hal 516*

²⁷ *Ibid hal 517*

menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu .

Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan psikologi . Sementara itu ,pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan tersebut didalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung kontroversi masing-masing .

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih,yaitu faktor social ekonomi , faktor sosiologis dan faktor kepercayaan politik .

1. Faktor Sosial Ekonomi

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku *non-voting* selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku *non-voting* tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih *non-voting* itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan

dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku *non-voting*. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran memilih.

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan Raymond F Wolfinger dan Steven J. Rosenstone yaitu²⁸ :

- a) Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat

²⁸ Efriza, *Political explore, bandung : Alfabeta, 2012 hal 543*

berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya.

- b) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut , disamping menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi , baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan .dalam sebuah tulisannya ,Wolfinger dan Rossetone menjelaskan sebagai berikut , disekolah dan perkuliahan,kita belajar mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita,dan diterangkan untuk menekankan sebayannya untuk berpartisipasi dalam proses politik,dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan , dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara . yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik , ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar .

Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan *“the best knows about turnout is that citizens of*

*higher social and economics status participate more in politics...” (yang utama tentang kehadiran bahwa warga Negara yang status social dan ekonomi lebih berpartisipasi politik...)*²⁹

Penjelasan diatas menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara tingkat status social ekonomi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih.

2. Faktor Psikologis

Penjelasan nonvoting dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih.

Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

²⁹ Efriza , *Political explore, bandung : Alfabeta , 2012 hal 543*

Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (*personal effectiveness*), yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa mampu memimpin teman-teman sepermainan, organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi di mana mereka bekerja, dan sebagainya.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku *nonvoting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi.³⁰

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya

³⁰ Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics*, California : A Division of Wodsworth Inc, 1987, hal. 208-209

sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada diluar kontrol para pemilih.

Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan *powerlessness* inilah yang disebut sebagai anomie. Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan sebagainya.

3. Faktor Rasional

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa

membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya³¹

Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson (1971) dan Down (1957) , “ tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka . Pertanyaannya yang akan diajukan individu yang rasional ketika mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi adalah : ‘ Apa yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya? ‘ dalam suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan , jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.”ini adalah scenario “ free rider “ (pengguna layanan public yang tidak mau memenuhi kewajibannya) ketika non partisipasi merupakan opsi yang paling

³¹ Muhammad, Asfar, *Presiden Golput*, Jakarta : Jawa Pos Press, 2004, hal. 35-51

rasional . Hal ini menjadikan olson sampai pada kesimpulan bahwa ‘ individu yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum dan kelompok³²

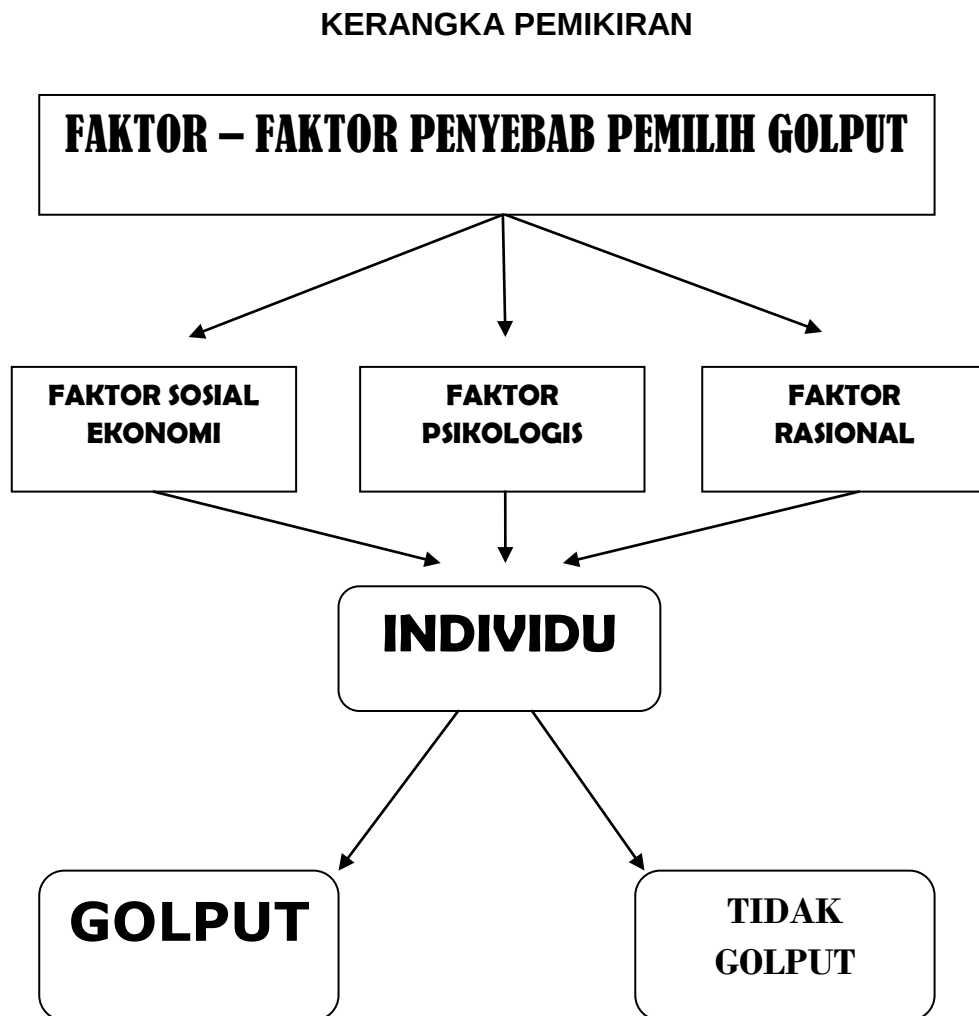
2.4. Kerangka Pemikiran

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk golput atau tidak golput secara garis besar dibedakan atas 3 bagian, yaitu faktor Sosial ekonomi, menyangkut masalah latar belakang social maupun keadaan ekonomi pemilih , Faktor Psikologis menyangkut masalah cirri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat , Selanjutnya faktor rasional menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan rugi serta pertimbangan – pertimbangan yang matang .Seluruh faktor diatas akan saling mempengaruhi dan mengambil peran dalam diri seseorang sebelum akhirnya orang itu memutuskan untuk menjadi golput

Faktor-faktor di atas di kumpulkan melalui, wawancara maupun pengamatan di lapangan dianalisis untuk mengetahui faktor apa yang menentukan atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi golput atau tidak golput.

³² Efriza ,*Political Explore*,Bandung : Alfabeta ,2012 hal. 516

Titik kritis penelitian ini adalah sudah sesuaikah antara usaha yang dilakukan untuk meminimalisir golput dengan faktor-faktor yang muncul sebagai penyebab munculnya keputusan golput.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Dan Dasar Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada menjadi penentu untuk pengambilan keputusan dalam menentukan wakil rakyat, namun partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan terkadang menurun sehingga menciptakan kelompok sendiri yang disebut golput (golongan putih), kelompok ini tidak menggunakan haknya dalam setiap pemilihan kepala daerah yang di selenggarakan lima tahun sekali oleh daerah.

Fenomena inilah yang mendorong penulis ingin melakukan penelitian secara kualitatif, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa buku, dan artikel baik dari media massa, jurnal maupun website yang memberikan informasi tentang bagaimana partisipasi politik dan perilaku masyarakat yang terkait golput.

Tipe penelitian adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat yang kemudian menimbulkan golput dalam setiap pilkada.